



RENJA

Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025

2.1	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	17
2.3	Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	26
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	48

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1	Rumusan Perencanaan Anggaran	57
4.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah	58

BAB V PENUTUP

5.1	Catatan Penting	108
5.2	Kaidah Pelaksanaan	108
5.3	Saran dan Tindak Lanjut	109

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025	9
---	---

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Program dan Capaian Kinerja Program Dinas PERKIM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	18
---	----

TABEL 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur	25
--	----

TABEL 2.4

Tabel Isu Strategis Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur yang dipetakan berdasarkan perspektif KLHS, Nasional, Regional, dan Global Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur	28
---	----

TABEL 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	32
---	----

TABEL 3.1

Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	36
---	----

TABEL 3.2

Tabel Tujuan dan Sasaran	41
--------------------------------	----

TABEL 3.3

Tabel Strategi Perangkat Daerah	43
---------------------------------------	----

TABEL 3.4

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	47
---	----

TABEL 3.5

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026	49
--	----

TABEL 4.1

Rumusan Awal Pendanaan Tahun Anggaran 2026	58
--	----

TABEL 4.2

Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	59
--	----

TABEL 4.3

Usulan Masyarakat Tahun 2026	71
------------------------------------	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renja ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Renja ini memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang diarahkan pada peningkatan kualitas hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum secara efektif dan terukur. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih perlu penyempurnaan, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan. Semoga Renja ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,



H. Ahmad Iip Makruf, ST., MT.
NIP 19720418 199803 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2026 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode tahun 2025-2030. Disamping itu, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026, bersinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan 2026 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 sebagai bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030;
8. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2030;
9. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara sistematis, terarah, dan terukur. Renja ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga tercipta keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Selain itu, Renja dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi instrumen dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah secara responsif dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyelaraskan perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan RPJMD;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
5. Mendukung pencapaian target pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perencanaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dengan demikian, Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Renja, yang meliputi:

- Latar Belakang
Menjelaskan pentingnya penyusunan Renja serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.
- Landasan Hukum
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja.
- Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja.
- Sistematika Penulisan
Menguraikan susunan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, meliputi:

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Berisi realisasi program/kegiatan dan tingkat capaian kinerja.
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menggambarkan capaian indikator pelayanan.
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
- Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rencana awal dengan hasil analisis perangkat daerah.
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil Musrenbang atau aspirasi masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi:

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Keterkaitan dengan arah kebijakan pusat dan daerah.
- Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2026.
- Program dan Kegiatan Prioritas
Arah kebijakan program sesuai prioritas pembangunan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan inti dokumen, yang memuat:

- Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Indikator Kinerja dan Target
- Lokasi Kegiatan
Kelompok Sasaran
- Pagu Indikatif
Disajikan dalam bentuk tabel sesuai format SIPD/Permendagri 90.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat:

- Penegasan pentingnya Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- Komitmen peningkatan kinerja perangkat daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (TAHUN 2025)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) OPD dilaksanakan sebagai bentuk implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap dokumen perencanaan wajib dilakukan pengendalian dan evaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pelaksanaan evaluasi Renja Tahun 2025 mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. **Kebijakan perencanaan program dan kegiatan**, yang meliputi kesesuaian perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
2. **Pelaksanaan program dan kegiatan**, yang menilai tingkat realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan;
3. **Hasil pelaksanaan program dan kegiatan**, yang mengukur capaian indikator kinerja serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan 6 (enam) program, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan subkegiatan. Dari hasil penelaahan dokumen, terdapat sekitar 20 kegiatan utama yang kemudian dirinci lebih lanjut menjadi 40 subkegiatan yang tersebar pada masing-masing bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perumahan Swadaya, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan Umum, dan Bidang PSU.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2025 bisa kita lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	URUSAN PEMERINTAHAN									
-	-	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	-	UNIT ORGANISASI									
	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
I	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.178.875.622								
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		562.054.000				418.178.675			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	321.123.000	269.508.000	6,37	100	6,3684	225.003.460	83,49	5,3168	44.504.540
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.813.000	150.813.000	3,56	100	3,5637	88.774.000	58,86	2,0977	62.039.000
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	159.728.000	141.733.000	3,35	100	3,3491	104.401.215	73,66	2,4670	37.331.785
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.415.823.256				20.148.459.164			

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.790.183.008	24.782.283.256	585,60	100	585,6018	19.573.586.165	78,98	462,5210	5.208.697.091
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	705.640.000	476.828.000	11,27	100	11,2674	447.462.000	93,84	10,5735	29.366.000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	170.504.000	156.712.000	3,70	100	3,7031	127.410.999	81,30	3,0107	29.301.001
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-				-			
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00	0	0,0000	-	0,00	0,0000	-
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0,00	0	0,0000	-	0,00	0,0000	-
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200.000.000				199.756.500			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	200.000.000	4,73	100	4,7260	199.756.500	99,88	4,7202	243.500
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00	0	0,0000	-	0,00	0,0000	-
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		491.235.066				461.690.776			
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.898.205	156.898.205	3,71	100	3,7075	151.389.550	96,49	3,5773	5.508.655

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.378.000	294.378.000	6,96	100	6,9561	272.446.492	92,55	6,4379	21.931.508
	3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.958.861	39.958.861	0,94	100	0,9442	37.854.734	94,73	0,8945	2.104.127
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.961.494.000				4.365.963.000			
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.555.200.000	1.748.232.000	41,31	100	41,3105	1.374.599.000	78,63	32,4816	373.633.000
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.613.262.000	3.213.262.000	75,93	100	75,9289	2.991.364.000	93,09	70,6855	221.898.000
	-	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.729.085.900				1.711.858.258			
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000	336.000.000	7,94	100	7,9396	334.639.350	99,60	7,9075	1.360.650
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.187.548	1.393.085.900	32,92	100	32,9184	1.377.218.908	98,86	32,5435	15.866.992
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		300.000.000				293.382.791			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	200.000.000	4,73	100	4,7260	197.762.791	98,88	4,6731	2.237.209

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	2,36	100	2,3630	95.620.000	95,62	2,2595	4.380.000
II	-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	35.166.704.900								
	-	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		998.821.000				698.821.000			
	1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	349.822.000	249.822.000	5,90	50,0	2,9516	49.822.000	19,94	1,1773	200.000.000
	2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	848.999.000	748.999.000	17,70	100	17,6987	648.999.000	86,65	15,3358	100.000.000
	-	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.550.000				-			
	1	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	16.550.000	50.550.000	1,19	0	0,0000	-	0,00	0,0000	50.550.000
	-	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		32.542.333.900				9.554.916.100			

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6.074.600.000	6.740.600.000	159,28	80	127,4235	2.387.087.000	35,41	56,4065	4.353.513.000
	2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.075.000.000	13.500.000.000	319,00	0	0,0000	-	0,00	0,0000	13.500.000.000
	3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.512.900	500.512.900	11,83	55	6,5049	267.368.100	53,42	6,3179	233.144.800
	4	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.301.221.000	11.801.221.000	278,86	100	278,8611	6.900.461.000	58,47	163,0569	4.900.760.000
III	-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)	465.077.524.680								
	-	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		500.000.000				-			
	1	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	500.000.000	500.000.000	11,81	0	0,0000	-	0,00	0,0000	500.000.000

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan	Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA	
					Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
	-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	682.831.297.882				522.677.243.068				
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.925.000.000	59.771.989.752	1.412,40	100	1.412,4035	51.520.738.550	86,20	1.217,4276	8.251.251.202
	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	439.421.872.060	667.600.645.262	15.775,31	91,27	14.398,1226	508.458.722.644	76,16	12.014,8062	159.141.922.618
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	189.969.620	189.969.620	4,49	20	0,8978	35.533.600	18,70	0,8397	154.436.020
	4	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	5.591.863.000	591.863.000	13,99	100	13,9856	591.863.000	100,00	13,9856	-

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	448.820.000	448.820.000	10,61	100	10,6056	421.366.000	93,88	9,9568	27.454.000
	6	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	9.000.000.000	14.000.000.000	330,82	100	330,8180	13.169.757.824	94,07	311,1995	830.242.176
IV	-	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	394.897.800								
	-	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		894.897.800				384.007.190			
	1	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	261.022.800	761.022.800	17,98	100	17,9829	384.007.190	50,46	9,0740	377.015.610
	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	133.875.000	133.875.000	3,16	0	0,0000	-	0,00	0,0000	133.875.000
V	-	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) (BIDANG PSU)	468.681.816.480								
	-	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		746.339.289.578				616.903.509.972			
	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.009.900.000	4.009.900.000	94,75	100	94,7534	3.857.317.278	96,19	91,1479	152.582.722

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kegiatan		Anggaran APBD Tahun 2025 (Rp)	Anggaran APBD-P Tahun 2025 (Rp)	Bobot (%)	Realisasi					SISA DANA
						Fisik (%)	Tertimb Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Tertimb Keu (%)	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	467.671.916.480	742.329.389.578	17.541,14	92,25	16.181,6982	613.046.192.694	82,58	14.486,1930	129.283.196.884
VI	-	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73.133.050	73.133.050							
	-	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		73.133.050				13.854.462			
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	73.133.050	73.133.050	1,73	20	0,3456	13.854.462	18,94	0,3274	59.278.588

Sumber : Dinas Perkim 2025 data diolah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kajian dilakukan terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Disperkim , hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa kita lihat dari tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Program dan Capaian Kinerja Program Dinas PERKIM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			KETERANGAN
			Target	Capaian	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	37.682.362.062	31.230.140.290	82,88%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	86,81%	87%	33.591.704.900	10.253.737.100	30,52%	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35%	43%	102%	743.103.287.634	574.197.981.618	77,27%	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	0,24942%	0,2492%	100%	894.897.800	384.007.190	42,91%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31,43%	101%	746.475.421.136	616.903.509.972	82,64%	

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			KETERANGAN
			Target	Capaian	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	83,66%	82,86%	99%	73.133.050	13.854.462	18,94%	

No	PROGRAM	HAMBATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyesuaian administrasi dan proses verifikasi dokumen keuangan pada akhir tahun anggaran.	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Proses verifikasi calon penerima bantuan dan kelengkapan dokumen administrasi memerlukan waktu.	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Proses koordinasi lintas sektor dalam penataan kawasan.	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Validasi data RTLH memerlukan pembaruan berkala.	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu.	

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			KETERANGAN
			Target	Capaian	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kelengkapan persyaratan administrasi pemohon (pengembang perumahan) belum seluruhnya terpenuhi.							

No	PROGRAM	PENDORONG	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan lahan dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan kawasan kumuh	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rumah tidak layak huni	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Ketersediaan bahan dan material serta cuaca yang mendukung	

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			KETERANGAN
			Target	Capaian	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-							

No	PROGRAM	PERMASALAHAN REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terdapat kelebihan penganggaran terkait gaji dan tunjangan ASN	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Adanya ketebatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Adanya ketebatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Adanya ketebatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Terdapat sisa pagu anggaran karena adanya proses administrasi	

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			KETERANGAN
			Target	Capaian	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia							

Sumber : Dinas Perkim 2025 data diolah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan kondisi yang cukup optimal, dengan sebagian besar program telah mencapai atau mendekati target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 82,88%, yang mencerminkan pelaksanaan fungsi penunjang yang efektif. Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian masing-masing sebesar 102% dan 101%, serta didukung oleh realisasi anggaran yang relatif tinggi, yaitu sebesar 77,27% dan 82,64%.

Sementara itu, beberapa program masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Program Pengembangan Perumahan mencapai kinerja sebesar 87% dengan realisasi anggaran sebesar 30,52%, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait proses verifikasi administrasi dan penetapan penerima manfaat. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai kinerja sebesar 99%, namun realisasi anggaran masih rendah yaitu sebesar 18,94%, yang menunjukkan keterbatasan dalam pemanfaatan anggaran secara optimal.

Adapun Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh telah mencapai target kinerja sebesar 100%, namun realisasi anggaran baru mencapai 42,91%, yang mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan atau penundaan sebagian kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran antara lain meliputi kendala administratif, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta perlunya validasi dan pemutakhiran data secara berkala, khususnya terkait data rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya kelengkapan persyaratan administrasi dari masyarakat/pemohon juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program tertentu.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang cukup signifikan, antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat, ketersediaan lahan, serta dukungan kondisi

teknis seperti ketersediaan material dan kondisi cuaca yang relatif mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan dalam aspek perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta optimalisasi penyerapan anggaran agar tercapai keselarasan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun perencanaan berikutnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih perlu terus dilakukan, terutama dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya mencapai target kinerja secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi yang lebih terukur menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Pelayanan Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.3 Sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	Target SPM / Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)	Standar Nasional (SPM/IKK)	Keterangan
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	86,81	87	≥ 70%	Belum optimal
2	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	42,35	43	102	100%	Tercapai
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	Unit	0,24942	0,2492	100	-	Tercapai
4	Persentase Ketersediaan PSU Perumahan	%	31	31,43	101	≥ 80%	Tercapai
5	Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	100%	Tercapai
6	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100	100	100	100%	Tercapai

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

2.3. Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Pada bagian perumusan isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh dinas berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.

Adapun Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Kesenjangan Akses Hunian Layak dan Ketertinggalan Penanganan RTLH , bagaimana meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap hunian layak melalui peningkatan program stimulan, pendanaan alternatif, dan kolaborasi antarpihak.
2. Masih Terbatasnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Minimnya Ketersediaan PSU , bagaimana memastikan ketersediaan PSU secara layak, memperkuat pengawasan pengembang, dan memperluas pembangunan infrastruktur permukiman yang merata.
3. Masih Berkembangnya Kawasan Kumuh dan Potensi Kemunculan Kumuh Baru , bagaimana mempercepat penanganan kawasan kumuh dan mencegah munculnya kumuh baru melalui penataan ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan pengawasan pembangunan perumahan.
4. Ketidakterpaduan Data Perumahan dan Permukiman dalam Mendukung Perencanaan, bagaimana memperkuat sistem informasi perumahan dan permukiman yang terintegrasi, akurat, dan dapat mendukung perencanaan berbasis data.
5. Peningkatan Risiko Bencana terhadap Hunian serta Perlunya Penanganan Cepat dan Tepat, bagaimana memperkuat mitigasi risiko bencana pada hunian, mempercepat respons pascabencana, dan memastikan perencanaan yang berorientasi ketangguhan.

6. Lemahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan Permukiman, bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur permukiman.
7. Tantangan Tata Kelola dan Kualitas SDM dalam Pelayanan Perumahan dan Permukiman, bagaimana memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM teknis, mempercepat digitalisasi layanan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
8. Tantangan Implementasi Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bagaimana memastikan kesesuaian pembangunan permukiman dengan tata ruang dan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang.

Berikut ini adalah Tabel Isu Strategis Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur yang dipetakan berdasarkan Perspektif KLHS, Nasional , Regional dan Global :

Tabel 2.4
Tabel Isu Strategis Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur yang dipetakan berdasarkan perspektif KLHS, Nasional, Regional, dan Global
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Timur

No	Isu Strategis Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Nasional yang Relevan	Isu Regional (Kaltim/Kabupaten)	Isu Global yang Relevan
1	Peningkatan akses hunian layak dan percepatan penanganan RTLH	Pemenuhan hak dasar masyarakat, pengurangan kerentanan sosial, peningkatan kesehatan dan kenyamanan hunian	Backlog perumahan nasional, program rumah layak huni, penuntasan kemiskinan ekstrem	Masih tingginya RTLH di Kutai Timur dan daerah peri-urban	Agenda SDGs: No Poverty, Sustainable Cities & Communities
2	Pemerataan infrastruktur permukiman dan pemenuhan PSU oleh pengembang	Ketahanan infrastruktur, kualitas lingkungan permukiman	Standarisasi PSU perumahan, P3-TGAI, kebijakan penyediaan infrastruktur dasar	Ketimpangan layanan dasar antar kecamatan, minim PSU pada perumahan baru	SDGs Target 11.3 dan 11.7 terkait akses infrastruktur dasar dan ruang publik
3	Penanganan kawasan kumuh dan pencegahan kumuh baru	Pencegahan pencemaran, sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 0% permukiman kumuh	Masih adanya titik kumuh, pertumbuhan permukiman tidak terkendali	Agenda New Urban Agenda: penyelesaian urban slums
4	Integrasi data perumahan-permukiman untuk perencanaan tepat sasaran	Sistem informasi lingkungan dan tata ruang berkelanjutan	Satu Data Indonesia, integrasi data sektoral perumahan	Data RTLH dan PSU belum terpadu antar OPD	Transformasi digital global dan open data governance
5	Penguatan mitigasi bencana perumahan dan respons cepat pascabencana	Peningkatan ketangguhan iklim, adaptasi perubahan iklim	Kebijakan ketahanan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Kutim rawan banjir, kebakaran, dan longsor; kerusakan rumah meningkat	Climate Change Adaptation (IPCC), Sendai Framework

No	Isu Strategis Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Nasional yang Relevan	Isu Regional (Kaltim/Kabupaten)	Isu Global yang Relevan
6	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan permukiman	Pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan sosial-lingkungan	Gerakan partisipatif pengelolaan lingkungan, pemberdayaan desa	Menurunnya budaya gotong royong, rendahnya pemeliharaan lingkungan	SDGs 11 & 17: Community participation & partnerships
7	Penguatan tata kelola, kualitas SDM, dan digitalisasi layanan	Integrasi tata kelola lingkungan, efisiensi layanan publik	Reformasi birokrasi, SPBE, digitalisasi pelayanan publik	SDM teknis terbatas; SOP belum terdigitalisasi	Global trend: smart governance, e-government
8	Pengendalian pemanfaatan ruang dan kesesuaian pembangunan permukiman dengan RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung & daya tampung	Implementasi RTRW Nasional, kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Pembangunan permukiman di kawasan tidak sesuai tata ruang (rawan banjir, bantaran sungai)	Prinsip global urban planning & land-use sustainability

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Berdasarkan identifikasi isu strategis, terdapat beberapa permasalahan utama yang saling terkait antara aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Permasalahan mendasar masih berfokus pada rendahnya akses masyarakat terhadap hunian layak dan tingginya RTLH, yang sejalan dengan isu nasional backlog perumahan dan target pengentasan kemiskinan. Selain itu, ketimpangan infrastruktur permukiman dan belum optimalnya penyediaan PSU menunjukkan masih adanya kesenjangan pelayanan dasar antar wilayah, khususnya di kawasan berkembang dan peri-urban.

Di sisi lain, penanganan kawasan kumuh dan pengendalian pertumbuhan permukiman menjadi tantangan penting akibat belum optimalnya pengawasan tata ruang serta masih adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW. Hal ini diperkuat oleh belum terintegrasinya data perumahan dan permukiman, sehingga mempengaruhi ketepatan perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Isu lain yang juga signifikan adalah rendahnya ketangguhan terhadap bencana, mengingat karakteristik wilayah yang rawan banjir dan kebakaran, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan permukiman. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan SDM teknis dan belum optimalnya digitalisasi layanan turut menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, isu-isu tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan, dengan memperhatikan keselarasan antara kebijakan nasional, regional, dan agenda global seperti SDGs, guna mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah

Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur, OPD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Dari hasil musrenbang tersebut maka telah direkapitulasi seluruh usulan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 tersebut bisa kita lihat dari tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RKPD	Pagu RKPD (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan	Target Renja	Pagu Renja (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	66	22.876.254.253	Kebutuhan operasional meningkat	66	18.791.980.288	(2.650.000.000)	Penyesuaian kebutuhan riil
		Nilai IPASN	76			76			
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan korban terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	49,95%	20.900.000.000	Penambahan target RTLH	49,95%	7.350.000.000	(13.550.000.000)	Prioritas penanganan RTLH
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	38,73%	273.357.347.348	Perluasan lokasi penanganan	38,73%	308.006.345.313	34.648.997.965	Penyesuaian lokasi prioritas
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang ditangani	16,25%	3.600.000.000	Kebutuhan peningkatan intervensi	16,25%	315.000.000	(3.285.000.000)	Optimalisasi pengurangan RTLH
5	Program PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	32%	269.350.000.000	Penambahan lokasi PSU	32%	319.297.349.488	49.947.349.488	Dukungan kawasan permukiman
6	Program Sertifikasi dan Registrasi	Presentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanaka Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	20%	100.000.000	Kebutuhan peningkatan pelayanan	20%	100.000.000	-	Penyesuaian administrasi

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, secara umum terdapat penyesuaian antara target kinerja dan alokasi anggaran (pagu) yang mencerminkan prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal daerah. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terjadi penurunan pagu anggaran meskipun target kinerja tetap, yang menunjukkan adanya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan riil operasional.

Pada Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, terjadi penurunan signifikan pada pagu anggaran, meskipun kebutuhan intervensi—khususnya terkait penanganan RTLH—masih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan anggaran sehingga perlu dilakukan penajaman prioritas kegiatan agar tetap berdampak terhadap pencapaian target.

Sebaliknya, pada Program Kawasan Permukiman dan Program PSU, terjadi peningkatan pagu anggaran yang cukup signifikan, sejalan dengan kebutuhan perluasan lokasi penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus kebijakan ke arah penanganan kawasan secara lebih luas dan terintegrasi.

Sementara itu, Program Sertifikasi dan Registrasi relatif stabil tanpa perubahan pagu, yang mencerminkan kegiatan bersifat administratif dan tetap berjalan sesuai kebutuhan pelayanan.

Secara keseluruhan, hasil reviu menunjukkan bahwa sinkronisasi antara target kinerja dan penganggaran telah dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, efisiensi belanja, serta keterbatasan sumber daya, namun masih diperlukan penguatan dalam strategi pengalokasian anggaran agar lebih optimal dalam mendukung pencapaian indikator kinerja, khususnya pada sektor perumahan dan penanganan RTLH.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .

Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini terintegrasi dalam kebijakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Arah kebijakan nasional di bidang perumahan menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau, melalui pengurangan backlog perumahan, percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, kebijakan nasional juga mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman, khususnya dalam penanganan kawasan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat, pembangunan kawasan permukiman juga diarahkan pada pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, guna mendukung terciptanya lingkungan hunian yang layak dan berfungsi secara optimal. Hal ini mencakup penyediaan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi bagian dari standar pelayanan dasar.

Lebih lanjut, kebijakan nasional juga menekankan pentingnya penguatan sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melalui peningkatan tata kelola, integrasi data perumahan, serta penerapan perencanaan berbasis kinerja. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program secara efektif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam konteks tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional, melalui pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terarah, terpadu, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penanganan RTLH, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, serta penyediaan PSU yang memadai.

Selain itu, kebijakan Kementerian juga mengarahkan agar pembangunan perumahan memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana dan keberlanjutan lingkungan, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 diharapkan mampu mengakomodasi kebijakan nasional tersebut, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Tabel Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan Nasional (Kementerian PKP/PUPR)	Sasaran Nasional	Permasalahan Daerah (Kutai Timur)	Arah Kebijakan Daerah (Renja PERKIM)	Program/Kegiatan Daerah
1	Pengurangan backlog perumahan dan penyediaan rumah layak huni	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak	Masih tingginya RTLH dan keterbatasan rumah layak huni	Peningkatan penanganan RTLH dan pembangunan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Meningkatnya kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah	Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis swadaya	Kegiatan Perbaikan RTLH
3	Penanganan kawasan permukiman kumuh (Program KOTAKU)	Penurunan luas kawasan kumuh	Masih terdapat kawasan kumuh dan potensi tumbuhnya kawasan kumuh baru	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Terpenuhinya infrastruktur dasar permukiman	Ketimpangan penyediaan PSU pada perumahan	Peningkatan penyediaan dan pemerataan PSU	Program Peningkatan PSU
5	Penguatan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas tata kelola perumahan	Data perumahan belum terintegrasi	Penguatan sistem data dan perencanaan berbasis kinerja	Kegiatan pendataan dan perencanaan
6	Peningkatan ketahanan bencana sektor perumahan	Meningkatnya ketahanan hunian terhadap bencana	Wilayah rawan banjir, kebakaran, dan longsor	Peningkatan rehabilitasi dan relokasi rumah terdampak bencana	Program Pengembangan Perumahan
7	Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Keterbatasan SDM dan digitalisasi layanan	Peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi layanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

No	Kebijakan Nasional (Kementerian PKP/PUPR)	Sasaran Nasional	Permasalahan Daerah (Kutai Timur)	Arah Kebijakan Daerah (Renja PERKIM)	Program/Kegiatan Daerah
8	Pencapaian SDGs (Hunian layak dan kota berkelanjutan)	Terwujudnya kota inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan permukiman belum sepenuhnya terkendali	Pengendalian pembangunan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan	Program Kawasan Permukiman

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan arah kebijakan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program daerah mendukung pencapaian target nasional, khususnya dalam penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dimaksud dengan SPM ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan yang dimaksud Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Adapun SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang diampu oleh DISPERKIM terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yang diampu ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;

Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

Keterkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan dasar, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana serta peningkatan kualitas permukiman yang memenuhi standar kelayakan, kesehatan, dan keselamatan.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan SPM diwujudkan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang terarah pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi korban bencana, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di samping itu, pemenuhan SPM juga didukung oleh penguatan sistem pendataan dan verifikasi yang akurat dan terpadu guna menjamin ketepatan sasaran pelaksanaan program.

Lebih lanjut, pencapaian SPM merupakan salah satu tolok ukur kinerja pelayanan perangkat daerah yang harus diintegrasikan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target SPM secara efektif dan akuntabel.

Dengan terpenuhinya SPM secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan kondisi permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan tujuan dan sasaran ini juga memperhatikan arah kebijakan nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kondisi dan permasalahan aktual di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan dan sasaran kita tuangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Misi Daerah	Misi 3: Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas	Misi ini menekankan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perumahan dan permukiman, untuk memperkuat konektivitas dan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.
Tujuan Daerah	Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan kualitas permukiman dianggap sebagai prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran Daerah	Sasaran 6: Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Sasaran ini mencerminkan pentingnya pemerataan pembangunan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta penataan kawasan antara desa dan kota agar tumbuh secara harmonis.
Tujuan Perangkat Daerah (PD)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas hunian layak bagi masyarakat.	Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang aman, sehat, dan layak huni.
	Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertata, aman, dan bebas kumuh.	Berkontribusi pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.
	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola perumahan-permukiman.	Meningkatkan efektivitas layanan, penguatan regulasi, dan integrasi sistem data.
Sasaran Perangkat Daerah (PD)	Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.	Output utama yang mendukung pencapaian sasaran daerah dan misi wilayah.
	Menurunnya jumlah dan luas kawasan permukiman kumuh.	Mendorong lingkungan sehat dan mengurangi kesenjangan wilayah.
	Meningkatnya penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar permukiman (PSU).	Menunjang konektivitas dan pemerataan pelayanan publik.
	Meningkatnya kecepatan dan kualitas layanan perumahan melalui digitalisasi dan tata kelola.	Mengarah pada pemerintah yang berintegritas dan responsif.
	Meningkatnya kesiapsiagaan perumahan dalam penanganan bencana dan rehabilitasi.	Menjamin ketahanan permukiman terhadap risiko bencana.

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Strategi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta berkeadilan antara desa dan kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menetapkan strategi yang berfokus pada pemerataan akses hunian layak, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan penyediaan infrastruktur dasar secara merata. Strategi tersebut mencakup percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berbasis kebutuhan wilayah prioritas, khususnya pada desa tertinggal dan kawasan dengan keterbatasan layanan dasar.

Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan ketahanan permukiman terhadap risiko bencana dan perubahan iklim melalui penataan drainase, peningkatan kualitas lingkungan, serta penerapan prinsip pembangunan hunian yang resilien. Dalam mendukung konektivitas desa–kota, dilakukan pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan, guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Lebih lanjut, Dinas Perkim memperkuat tata kelola pembangunan melalui integrasi perencanaan, pemutakhiran basis data sektoral, serta sinergi pendanaan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sumber lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kapasitas aparatur desa juga menjadi fokus dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan permukiman secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terukur, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tabel Strategi Perangkat Daerah

Isu Strategis Perkim	Strategi Perangkat Daerah	Penjelasan Strategis
Ketimpangan kualitas perumahan antara kawasan desa dan kawasan perkotaan	Memperluas pemerataan akses hunian layak di seluruh wilayah, khususnya desa tertinggal dan kawasan pinggiran kota.	Strategi ini memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas hunian tidak hanya dilakukan di pusat kota tetapi juga menjangkau desa–desa dan wilayah transmigrasi sehingga kesenjangan layanan dasar permukiman dapat ditekan.
Masih tingginya rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di desa dan kota	Melaksanakan rehabilitasi RTLH secara terarah, berbasis data, dan menysasar lokasi prioritas baik desa maupun perkotaan.	Pendekatan ini memperkuat kesinambungan pembangunan melalui intervensi serentak pada hunian-hunian tidak layak di berbagai wilayah sehingga kualitas hidup meningkat merata.
Pertumbuhan kawasan kumuh baru di pusat kota dan desa	Mengoptimalkan pencegahan & penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan kawasan terpadu (desa–kota).	Strategi ini membangun keterkaitan tata ruang desa–kota dengan meningkatkan kualitas permukiman melalui PSU, penataan lingkungan, dan pencegahan kumuh secara simultan.
Belum optimalnya infrastruktur penunjang relokasi dan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana	Memperkuat penyediaan rumah relokasi dan hunian baru layak huni dengan standar yang sama antara desa dan kota.	Intervensi ini menjaga kesinambungan penanganan bencana dengan standar layanan hunian yang konsisten, tidak membedakan lokasi desa atau kota.
Keterbatasan data dan perencanaan Perkim yang terintegrasi antarwilayah	Membangun sistem data perumahan–permukiman terintegrasi desa–kota serta memperkuat koordinasi lintas sektor.	Strategi ini menjamin bahwa keputusan pembangunan hunian dan permukiman berbasis data yang menyatukan kebutuhan wilayah pedesaan dan perkotaan.
Pengelolaan PSU dan lingkungan permukiman belum merata antara desa dan kota	Mendorong peningkatan kualitas PSU permukiman dengan standar teknis yang	Upaya ini memperkuat berkesinambungan pembangunan dengan menjadikan PSU dan lingkungan permukiman berfungsi secara optimal tanpa disparitas wilayah.

Isu Strategis Perkim	Strategi Perangkat Daerah	Penjelasan Strategis
	konsisten di desa maupun kota.	
Tingginya kesenjangan akses terhadap pelayanan perumahan bagi kelompok miskin desa–kota	Memprioritaskan intervensi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema pembiayaan dan fasilitasi berbasis pemerataan wilayah.	Strategi ini menjamin kelompok rentan memperoleh akses terhadap hunian layak secara adil, terutama di desa terpencil dan kawasan urban marginal.
Lemahnya kelembagaan pengelolaan permukiman skala kawasan (desa–kota)	Memperkuat kelembagaan masyarakat (KSM, BKM, Pokja PKP) sebagai aktor utama pengelolaan permukiman desa–kota.	Strategi ini mendukung keberlanjutan pembangunan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola aset permukiman secara inklusif.

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur difokuskan pada pemenuhan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman secara terencana, merata, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan RPJMD dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota. Kebijakan utama diarahkan pada peningkatan akses rumah layak huni melalui penanganan RTLH, pembangunan rumah baru, serta dukungan bagi masyarakat terdampak bencana; penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui pendekatan terpadu berbasis kawasan; serta pemerataan layanan perumahan dan infrastruktur dasar hingga ke wilayah perdesaan dan terpencil. Selain itu, kebijakan juga menekankan penguatan tata kelola melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi regulasi, digitalisasi layanan, dan sinergi lintas sektor. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini menjadi landasan strategis untuk mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 3.4
Tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Memperluas pemerataan akses hunian layak di desa dan kota	Pemerataan penyediaan hunian layak, terutama bagi masyarakat miskin, rentan, dan wilayah tertinggal.
Melaksanakan rehabilitasi RTLH berbasis data dan prioritas	Percepatan pengurangan RTLH melalui pemutakhiran data, penetapan lokasi prioritas, dan penerapan standar teknis hunian layak.
Pencegahan & peningkatan kualitas kawasan kumuh berbasis kawasan terpadu desa-kota	Penataan lingkungan permukiman, peningkatan PSU, dan pencegahan kumuh baru secara terpadu.
Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman secara merata	Penyediaan akses air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan sarana permukiman dasar lainnya di desa dan kota.
Pengembangan infrastruktur permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim dan risiko banjir	Integrasi mitigasi banjir, adaptasi iklim, dan desain hunian aman bencana dalam pembangunan permukiman.
Penyediaan rumah relokasi dan hunian aman bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program	Pembangunan rumah relokasi sesuai standar kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan sosial-ekonomi wilayah.
Penguatan sistem data dan perencanaan pembangunan perumahan-permukiman desa-kota	Pengembangan sistem data perumahan dan permukiman terpadu, serta penguatan tata kelola dan SOP perkim.
Peningkatan kualitas PSU permukiman secara konsisten di seluruh wilayah	Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman agar berfungsi merata dan berkelanjutan.
Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan dan pemeliharaan permukiman	Penguatan peran KSM, Pokja PKP, dan masyarakat desa-kota dalam peningkatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.
Integrasi program perumahan dengan Dana Desa dan program kabupaten	Harmonisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan permukiman melalui APBD, Dana Desa, dan pendanaan lainnya.

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur secara umum diarahkan pada upaya pemerataan akses hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan antara wilayah desa dan kota.

Hal ini diwujudkan melalui percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis data dan prioritas, penanganan serta pencegahan kawasan kumuh secara terpadu berbasis kawasan, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) permukiman yang merata, meliputi air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan.

Selain itu, strategi juga menekankan pembangunan permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, termasuk penyediaan hunian relokasi yang layak bagi masyarakat terdampak. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pengembangan sistem data terpadu, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan perencanaan yang terintegrasi. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan permukiman juga didukung melalui pemberdayaan masyarakat dan desa, serta integrasi program dan pendanaan antara pemerintah daerah, Dana Desa, dan sumber lainnya. Dengan demikian, keseluruhan strategi dan kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan permukiman yang layak, aman, merata, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kutai Timur “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” serta Misi ke-3 yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan digital untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan secara terintegrasi. Perumusan ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kondisi dan permasalahan aktual di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Selanjutnya, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dimaksud disajikan dalam tabel berikut sebagai bentuk penjabaran operasional yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3.4
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VISI KABUPATEN KUTAI TIMUR			
<i>"Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing"</i>			
MISI KE 3			
"Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas."			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas hunian layak bagi masyarakat	Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Memperluas pemerataan akses hunian layak di desa dan kota	Pemerataan penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin, rentan, dan wilayah tertinggal
Meningkatkan kualitas dan kelayakan rumah masyarakat	Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Melaksanakan rehabilitasi RTLH berbasis data dan prioritas	Percepatan pengurangan RTLH melalui pemutakhiran data, penetapan lokasi prioritas, dan standar teknis
Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertata, aman, dan bebas kumuh	Menurunnya luas dan jumlah kawasan permukiman kumuh	Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh berbasis kawasan terpadu desa-kota	Penataan lingkungan permukiman, peningkatan PSU, dan pencegahan kumuh baru secara terpadu
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya penyediaan dan kualitas PSU permukiman	Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman secara merata	Penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan sarana dasar lainnya
Mewujudkan permukiman yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana	Pengembangan infrastruktur permukiman yang resilien	Integrasi mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan desain hunian aman
Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana	Tersedianya hunian relokasi yang layak dan aman	Penyediaan rumah relokasi dan hunian aman	Pembangunan rumah relokasi sesuai standar kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan
Memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas layanan dan perencanaan berbasis data	Penguatan sistem data dan perencanaan pembangunan perumahan-permukiman	Pengembangan sistem data terpadu, digitalisasi layanan, dan penguatan SOP
Meningkatkan kualitas dan keberfungsian PSU permukiman	Meningkatnya kualitas dan pemerataan PSU	Peningkatan kualitas PSU permukiman secara konsisten	Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan kualitas PSU secara berkelanjutan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan dan pemeliharaan permukiman	Penguatan peran KSM, Pokja PKP, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Meningkatkan sinergi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman	Terintegrasinya program dan pendanaan pusat, daerah, dan desa	Integrasi program perumahan dengan Dana Desa dan program kabupaten	Harmonisasi perencanaan dan pendanaan melalui APBD, Dana Desa, dan sumber lainnya

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Program yang direncanakan merupakan instrumen utama dalam mencapai sasaran kinerja perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome). Setiap kegiatan dan sub kegiatan dirancang untuk menjawab permasalahan aktual di bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keberadaan kawasan kumuh, keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola dan layanan publik.

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keterpaduan antar sektor dan sumber pendanaan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara optimal, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2 Laporan
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/Bulan
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
1.04.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan
1.04.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.04.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
1.04.001.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
1.04.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.04.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit
1.04.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.002.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.002.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen
1.04.002.2.01.07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.04.002.2.01.08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.04.002.2.01.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.04.002.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	
1.04.002.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25 Orang
1.04.002.2.02.09	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang
1.04.002.2.02.10	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	25 Orang
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	
1.04.002.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	30 Unit
1.04.002.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	30 Unit
1.04.002.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	20 Unit
1.04.002.2.03.08	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	50 RT
1.04.002.2.03.09	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Unit

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.002.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.002.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen
1.04.002.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1.04.002.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.003.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
1.04.003.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	1 Laporan
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
1.04.003.2.02.008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP	1 Dokumen
1.04.003.2.02.014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
1.04.003.2.03.015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	18 Dokumen
1.04.003.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan
1.04.003.2.03.007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
1.04.003.2.03.009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ha

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.003.2.03.011	Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ha
1.04.003.2.03.012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200 Unit
1.04.003.2.03.013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ha
1.04.003.2.03.014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	1 Ha
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	5 Unit
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen
1.04.005.2.01.006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok
1.04.005.2.01.008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	18 Lokasi
1.04.005.2.01.010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1 Laporan
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	18 Lokasi

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.006.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
1.04.006.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan
1.04.0.00.0.00.01.0001	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket
1.04.001.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.005.2.01.011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi
1.04.0.00.0.00.01.0002	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
1.04.001.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.005.2.01.011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun perencanaan disusun sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas hunian masyarakat, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah baru layak huni, serta dukungan kemitraan dalam penyediaan hunian yang aman dan sehat. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Dinas Perkim juga memprioritaskan penanganan kawasan permukiman kumuh, khususnya pada kawasan dengan luasan di bawah 10 hektare, melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, penataan infrastruktur dasar, serta pelaksanaan relokasi apabila diperlukan. Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan wilayah, Dinas Perkim melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar permukiman (PSU), yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, drainase, gorong-gorong, serta jembatan lingkungan. Intervensi ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta kualitas lingkungan permukiman masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Seluruh program dan kegiatan Dinas Perkim tersebut secara substantif mendukung pencapaian 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur dasar, dan penataan kawasan permukiman. Selain itu, program tersebut juga selaras dengan Asta Cita pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pembangunan dari desa dan bawah, peningkatan kualitas hidup manusia, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

Dengan demikian, arah kebijakan dan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

RENCANA KERJA & PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Perencanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Bab ini memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur pada tahun perencanaan.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan ini juga menjadi instrumen dalam mendukung implementasi prioritas pembangunan daerah, termasuk 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur serta selaras dengan Asta Cita pembangunan nasional.

Dengan demikian, seluruh rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam bab ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Sebagai bentuk penjabaran yang lebih terstruktur, Pendanaan awal Tahun 2026 yang telah dirumuskan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Awal Pendanaan Tahun Anggaran 2026

NO	PROGRAM	RENCANA PENDANAAN 2026
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.350.000.000,00
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	308.006.345.313,00
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	315.000.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	315.847.349.488,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.791.980.288,00
7	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	2.410.000.000,00
8	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN	1.040.000.000,00
JUMLAH TOTAL		653.860.675.089,00

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

4.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan sumber pendanaan yg berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan mencapai target yang diharapkan, namun pendanaan tersebut tentulah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah suatu perangkat daerah, agar program prioritas pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka diharapkan selektif dan kehati-hatian mutlak diperlukan dalam mendanai sebuah program dan kegiatan dimaksud.

Untuk lebih jelasnya perihal Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana uraian dalam Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		653.860.675.088	Dinas Perkim & UPT
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		650.410.675.089	Dinas Perkim
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.791.980.288	Total Program Penunjang
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250.000.000	Program & Keuangan
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000	
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2 Laporan	100.000.000	
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.641.980.288	
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/Bulan	17.297.350.288,00	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	294.630.000	
1.04.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	50.000.000	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		170.000.000	Sekretariat
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	
1.04.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000	
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	50.000.000	
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		580.000.000	
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	330.000.000	
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	250.000.000	
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	50.000.000	
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	50.000.000	
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		7.350.000.000	SPM
1.04.002.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		350.000.000	
1.04.002.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.002.2.01.07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
1.04.002.2.01.08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.002.2.01.10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.002.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		400.000.000	
1.04.002.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25 Orang	100.000.000	Mandatory Pendidikan & SPM

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.002.2.02.09	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang	100.000.000	Mandatory Pendidikan & SPM
1.04.002.2.02.10	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	25 Orang	200.000.000	Mandatory Pendidikan & SPM
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		6.600.000.000	
1.04.002.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	30 Unit	540.000.000	
1.04.002.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	30 Unit	1.610.000.000	
1.04.002.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	20 Unit	100.000.000	
1.04.002.2.03.08	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	50 RT	100.000.000	
1.04.002.2.03.09	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Unit	4.250.000.000	
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		308.006.345.313	
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		250.000.000	
1.04.003.2.02.008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan PKP	1 Dokumen	50.000.000	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.003.2.03.015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga	200.000.000	Mandatory Pendidikan
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		307.756.345.313	
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	180.000.000	
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	18 Dokumen	284.376.345.313	
1.04.003.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	50.000.000	Penataan Permukiman Kumuh
1.04.003.2.03.007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000	Penataan Permukiman Kumuh
1.04.003.2.03.011	Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ha	50.000.000	Penataan Permukiman Kumuh
1.04.003.2.03.012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200 Unit	23.000.000.000	MBR Kumuh (RLH)
1.04.003.2.03.013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ha	50.000.000	Penataan Permukiman Kumuh
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		315.000.000	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		315.000.000	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	60.000.000	MBR diluar Kumuh
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	5 Unit	55.000.000	MBR diluar Kumuh
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	200.000.000	Mandatory Pendidikan
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		315.847.349.488	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		315.847.349.488	
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	500.000.000	
1.04.005.2.01.006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	200.000.000	Mandatory Pendidikan
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	18 Lokasi	315.147.349.488	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000	
1.04.006.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		100.000.000	
1.04.006.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	100.000.000	
1.04.0.00.0.00.01.0001	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara		2.410.000.000	UPT Sangatta utara
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.310.000.000	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		250.000.000	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	200.000.000	
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.000.000.000	
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	2.000.000.000	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.000.000	
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	60.000.000	
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100.000.000	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100.000.000	
1.04.005.2.01.011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	
1.04.0.00.0.00.01.0002	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan		1.040.000.000	UPT Sangatta Selatan
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		940.000.000	
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		140.000.000	
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	60.000.000	
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	60.000.000	
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	20.000.000	
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		800.000.000	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	800.000.000	
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100.000.000	
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100.000.000	
1.04.005.2.01.011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	
1.04.005.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Rumusan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai dasar pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman serta unit pelaksana teknis (UPT) terkait.

Total pagu anggaran perangkat daerah beserta UPT sebesar ±Rp653,86 miliar, yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan tata kelola perangkat daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran untuk mendukung fungsi administrasi, perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, penyediaan jasa penunjang, pengadaan barang milik daerah, serta

pemeliharaan aset daerah, termasuk dukungan operasional pada UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara serta Sangatta Selatan.

Selanjutnya, Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada penanganan korban bencana dan relokasi program pemerintah, melalui kegiatan pendataan, verifikasi, sosialisasi, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak.

Pada Program Kawasan Permukiman, kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan kumuh skala kecil (di bawah 10 hektare), melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah baru layak huni, kerja sama peningkatan kualitas permukiman beserta PSU, serta kegiatan pendataan, verifikasi, dan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu.

Selain itu, Program Pencegahan Permukiman Kumuh dilaksanakan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru melalui kegiatan penyadaran publik, pembangunan rumah layak huni di luar kawasan kumuh, serta perbaikan RTLH sebagai upaya preventif.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi anggaran signifikan untuk penyediaan PSU di kawasan perumahan, perencanaan, sosialisasi serah terima PSU, serta perbaikan infrastruktur lingkungan permukiman pada berbagai lokasi prioritas.

Sementara itu, Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk memperkuat tata kelola perizinan dan pengendalian pembangunan perumahan melalui koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi serta registrasi pengembang.

Secara keseluruhan, rumusan pendanaan ini disusun untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, termasuk 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur, serta selaras dengan Asta Cita pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas hunian, pemerataan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan penataan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

Selain bersumber dari rencana kerja perangkat daerah, penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 juga memperhatikan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Usulan Musrenbang yang telah melalui proses verifikasi dan penyelarasan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuan pendanaan, selanjutnya diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perkim, khususnya pada bidang peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), penataan kawasan permukiman, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Integrasi usulan masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mendukung rumusan awal pendanaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah disusun sebelumnya, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan riil masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, hasil Musrenbang menjadi salah satu dasar dalam memperkuat arah kebijakan dan prioritas program Dinas Perkim, sekaligus memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur dan Asta Cita pembangunan nasional.

Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah diverifikasi ini disusun sebagai hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten yang berkaitan dengan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Seluruh usulan yang tercantum dalam tabel ini telah melalui proses verifikasi dan penajaman oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, serta ketersediaan dan kemampuan pendanaan pada tahun perencanaan.

Penyajian daftar usulan yang telah diverifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel mengenai aspirasi masyarakat yang dapat diakomodasi ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah, serta sebagai bagian integral dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Sebagai penjelasan lebih rinci, rincian usulan yang telah diverifikasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Usulan Masyarakat Tahun 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
1	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu (panjang 300 m lebar 5 m)	Semenisasi Jl. Blok Etam I RT 003 Dusun II, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Barat	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
2	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu (panjang 300 m lebar 5 m)	Semenisasi Jl. Blok Etam II RT 007 Dusun II, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Barat	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
3	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu (panjang 300 m lebar 5 m)	Semenisasi Jl. Sulawesi III RT 007 Dusun II, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Barat	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
4	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan berupa tanah/batu	RT 05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Indah	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.408.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
5	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman yang berupa tanah/batu (600 M x 3 M),	Jl. Hadi Suhadi RT 009 Desa Sepaso Selatan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Selatan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 600m x Lebar 3m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.267.200.000, Kategori (Penurunan Stunting)
6	Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak Jalan Lingkungan Permukiman Yang belum dilengkapi dengan Penerangan jalan 5 Km sebanyak 100	GANG BANJAR MENUJU GANG REJEKI DARI RT 21,44,30,54,36,22,27, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara	Teluk Lingga	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (100 Unit) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.300.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
7	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian. Vol: P= 500m	Jl. Gemini RT.25 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara	Singa Gembara	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.760.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
8	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian. P = 5000M, L=2M	Belakang KOPIKAI RT 26 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara	Singa Gembara	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi Drainase (Panjang 5000m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 12.870.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
9	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Banyaknya jalan dengan lapisan permukaan tanah/batu	Jl Gotong royong RT 09 dan RT 12, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Timur	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
10	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah / batu (P=400m, L=6m)	Jl. Kapur RT.06 Dusun II Kobo Jaya, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara	Swarga Bara	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 400m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.408.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
11	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Sebagian besar permukaan jalan masih tanah	Jln. Eks Logging RT. 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tebangan Lembak	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1.000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.520.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
12	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan permukaan Jalan Lingkungan Permukiman Berupa Tanah/Batu (Panjang 1.200 m, Lebar 4 m, Tebal 0,2 m)	RT 02 (Jalan Masuk Gapura Kampung Budaya), Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Keraitan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1.200m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.379.200.000, Kategori (Penurunan Stunting)
13	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (2.665,65 M)	Jl. Tempakul RT. 05 Desa Muara Bengalon, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Muara Bengalon	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 2.665,65m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 9.383.088.000, Kategori (Penurunan Stunting)
14	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (1.000 M)	Jl. Abdullah RT. 10 Desa Muara Bengalon, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Muara Bengalon	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1.000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.520.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
15	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah atau Batu. (P= 1500 m, L= 4 m, T =20 cm)	Jl.HM.Mulya RT.002 Desa Tepian Langsung, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Langsung	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1.500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 4.224.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
16	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah	RT 1,2,3,5 & 12 Desa Sekerat, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Sekerat	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
17	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah atau Batu. (P= 1500 m, L= 4 m, T =20 cm)	Jl.Datuk Macan RT.003 Dusun 01 Desa Tepian Langsung, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Langsung	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1.500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 4.224.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
18	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Permukaan jalan masih agregat	RT 17 Dusun 5, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Bengalon	Tepian Baru	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
19	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	RT.003 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Mukti Jaya	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
20	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya peningkatan jalan berupa pengaspalan untuk jalan poros desa (300 meter)	RT.8, RT.11, RT.13, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Kebon Agung	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
21	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya peningkatan jalan berupa pengaspalan untuk jalan poros desa (300 meter)	RT.05, RT.06, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Kebon Agung	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
22	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya peningkatan jalan berupa pengaspalan untuk jalan poros desa (300 meter)	RT.02, RT.03, RT.04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Kebon Agung	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.056.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
23	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian Volume 3.000 M	RT.003 Desa Mukti Jaya, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Mukti Jaya	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi Drainase (Panjang 3.000m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 7.722.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
24	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan Lingkungan pemukiman berupa tanah /batu . Volume. 4 KM x 4 M	Jalan Persatuan RT. 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Rantau Makmur	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 4.000m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 11.264.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
25	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyaknya Drainase Lingkungan Permukiman berupa tanah galian VOLUME 1000 meter	Jalan Natuna RT.04/002 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Tanjung Labu	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi Drainase (Panjang 1.000m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.574.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
26	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyaknya Drainase Lingkungan Permukiman berupa tanah galian volume 600 meter	Jalan Timor RT.02/001 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Tanjung Labu	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi Drainase (Panjang 600m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.544.400.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
27	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyaknya Drainase Lingkungan Permukiman berupa tanah galian (800 meter)	Jalan Buru RT.05/002 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Tanjung Labu	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi Drainase (Panjang 800m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.059.200.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
28	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah atau batu/Kondisi Jalan Perkantoran Pemerintah Desa masih rusak, dibutuhkan Semeniasi dengan Ukuran P = 600 Meter, Lebar = 8 Meter	Jl. Ahmad Yani, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Tepian Makmur	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semeniasi Drainase (Panjang 600m) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.544.400.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
29	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	"Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu. Diperlukan Semeniasi dengan ukuran 900 m x 4 m x 0,20 m"	Dusun Sungai Tabuan Desa sangkima , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sanggata Selatan	Sangkima	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semeniasi (Panjang 900m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.534.400.000, Kategori (Kawasan Wisata)
30	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah /batu dengan volume 1000 m2	Blok A Desa Margomulyo RT 01 RW 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Margo Mulyo	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semeniasi (Panjang 200m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 704.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)
31	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah /batu dengan volume 1000 m2	Blok K Desa Margomulyo RT 06 RW 02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Margo Mulyo	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semeniasi (Panjang 200m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 704.000.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
32	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu ukuran 250 M x 4 M	Gang Pasar RT 04 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Masalap Raya	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 250 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
33	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu ukuran 250 M x 4 M	Jalan Ketapang RT 05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Masalap Raya	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 250 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
34	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu ukuran 250 M x 4 M	Jalan Ketapang RT 06 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Masalap Raya	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 250 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
35	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu, dengan ukuran 700M x 4M x 0,20M	RT.002, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Pulung Sari	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 700 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
36	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih ada drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian, dengan ukuran 500M x 0,70M x 0,70M	RT.001, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Rantau Pulung	Pulung Sari	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 500 m, L : 0,6 m, T : 0,65 m (Kat : Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
37	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	1. Kondisi Jalan yang masih berupa pengerasan 2. perlunya semenisasi jalan kawasan permukiman menuju kawasan wisata pantai pasir putih dan mangrove 3. Volume jalan Panjang 3.000 Meter, Lebar 5 Meter	Desa Teluk Singkama , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangatta Selatan	Teluk Singkama	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 3 km, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : eko wisata)
38	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian dengan volume panjang 400 meter, Lebar 80 cm, tinggi 1 Meter	Jalan Jambu RT 11, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sukamaju	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 400 m, L : 0,6 m, T : 0,65 m (Kat : Kemiskinan)
39	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan Rusak Berat	Jl. Poros Long Pejeng, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Busang	Long Lees	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
40	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya dilakukan semenisasi Jalan Poros Sidrap dengan Panjang 2000 meter dan lebar 6 meter karena kondisi jalan yang belum dilakukan semenisasi dan licin saat hujan	Jl. Poros Sidrap RT.01 dan RT.14 Dusun Batang Bengkal, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Martadinata	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 2000 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
41	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukaan berupa tanah/batu P=500M L=6M	Jl.Pendidikan RT.07, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Kandolo	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 500 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
42	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukaan berupa tanah/batu P=750 L=6M	Jl.Wisata RT.05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Kandolo	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 750 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
43	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Jl. Danau Toba II, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Makmur Jaya	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 250 m, L : 0,5 m, T : 0,6 m (kat : stunting)
44	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya semenisasi Jl. Thamrin Sepanjang 500 M, Lebar 5 M dikarenakan Jalanannya masih tanah dan berlubang	Jl. Thamrin RT. 20 Dusun Sungai Api-Api, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Rahmat	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 500 m, L : 5 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
45	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya Semenisasi Jl. Syukur Abadi Sepanjang 300 M, Lebar 5 M dikarenakan Jalannya masih Tanah dan Berlubang	Jl. Syukur Abadi RT. 14 Dusun Gunung Payo , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Rahmat	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 300 m, L : 5 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
46	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa batu. Volume : P = 1000m L = 4 M	Jl. danau redan I RT. 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Danau Redan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 1000 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
47	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya Semenisasi Jl. Daeng Masese Sepanjang 400 M, Lebar 5 M dikarenakan Jalannya masih Tanah dan Berlubang	Jl. Daeng Masese RT. 06 Dusun Sungai Api-Api , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Rahmat	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 400 m, L : 5 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
48	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu. Volume : P = 5 Km L= 4 Meter Ketebalan 20 cm	Jalan Sempayang RT. 11, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Teluk Pandan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 5 km, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
49	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Jl. Citandui RT 04 Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sidomulyo	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 200 m, L : 0,5 m, T : 0,6 m (Kat : Kemiskinan)
50	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya Semenisasi Jl. Abdul Azis Sepanjang 500 M, Lebar 5 M dikarenakan Jalannya masih Tanah dan Berlubang	Jl. Abdul Azis RT. 19 Dusun Sungai Api-Api , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Rahmat	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 500 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
51	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya Semenisasi Jl. Bukit Perjuangan Sepanjang 400 M, Lebar 5 M dikarenakan Jalannya masih Tanah dan Berlubang	Jl. Bukit Perjuangan RT. 05 Dusun Gunung Kuari , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Rahmat	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 400 m, L : 5 m, T : 0,2 m (kat : stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
52	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah/Batu	RT.06 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Damai	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
53	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak permukaan lapisan jalan lingkungan permukiman berupa tanah / batu Ukuran P : 1000 m x 5 m : 5000 m2	Jalan Gunung Kinibalu Rt/Rw 002/001, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Sri Pantun	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 1000 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
54	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Penghubung Jalan Danau Redan I dengan Danau Redan 2, akses utama masyarakat desa. Bisa menjadi jalan alternatif jika jalan poros nasional macet/tidak bisa diakses. Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa Batu. Volume : P = 1000 m L= 4m	RT 04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Danau Redan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 1000 m, L : 5 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
55	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah/Batu	Jl. Pembangunan RT. 05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Suka Damai	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
56	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu. Volume : P = 1 Km L= 4 Meter Ketebalan 20 Cm	RT.09 Desa Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Teluk Pandan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 1000 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
57	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu. Volume P= 400 Meter L= 4 Meter Ketebalan 20 Cm	RT. 04 Desa Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Teluk Pandan	Teluk Pandan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton P : 400 m, L : 4 m, T : 0,2 m. (Kat : Kemiskinan)
58	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah	RT 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Melan	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
59	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	Jl. Rajawali RT. 005, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
60	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Jl. Merak RT. 004 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wahau Baru	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 200 m, L : 0,5 m, T : 0,6 m (kat : stunting)
61	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (panjang 200 meter, 4 meter, tinggi 20 cm)	Jl. Kenanga RT.02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Marga Mulya	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
62	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	RT. 007 Desa Rantau Sentosa, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Busang	Rantau Sentosa	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 m (Kat : Kemiskinan)
63	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	RT. 005 Desa Rantau Sentosa, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Busang	Rantau Sentosa	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 200 m, L : 4 m, T : 0,2 (Kat : Kemiskinan)
64	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Desa Kombeng Indah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Kombeng Indah	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 200 m, L : 0,5 m, T : 0,6 m (Kat : Kemiskinan)
65	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Desa Kombeng Indah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Kombeng Indah	usulan ini diestimasi pekerjaan drainase beton ukuran P : 200 m, L : 0,5 m, T : 0,6 m (Kat : Kemiskinan)
66	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu P : 312 m, L : 4 m, T : 20 cm	Jl. Danau Toba 2 RT. 002, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kombeng	Makmur Jaya	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 312 m, L : 4 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
67	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (4 m x 2000m x 20 cm)	Jalan Nusantara RT. 15 dan 17, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 2 km, L : 4 m, T : 0,2 m (kat : stunting)
68	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (4 m x 750 m x 20 cm)	Jalan Jakarta RT. 04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	usulan ini diestimasi pekerjaan jalan beton ukuran P : 750 m, L : 4 m, T : 0,2 m (kat : stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
69	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (4 m x 1000 m x 20 cm)	Jalan Balikpapan RT. 07, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 1000 Meter dengan Nilai Rp. 3,120.000.000 (Stunting)
70	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Saluran Drainase Sudah Tidak Layak Yang Menyebabkan Luapan Air di Lingkungan (200-300 Meter)	Rt. 06 Desa Beno Harapan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Beno Harapan	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 50 Cm dan Tinggi 60 CM Penampang Basah) Panjang 300 Meter dengan Nilai Rp. 630.000.000, (Kemiskinan)
71	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (4 m x 600 m x 20 cm)	Jalan Marilonga RT. 10 dan 16, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Karya Bhakti	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 600 Meter dengan Nilai Rp. 1,872.000.000 (Stunting)
72	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Belum Adanya Drainase	Desa Long Pejeng RT 01 - RT 05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Busang	Long Pejeng	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 300 Meter dengan Nilai Rp. 540.000.000, (Kemiskinan)
73	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Jl. Peng'Len Rt. 002, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Jak Luay	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 300 Meter dengan Nilai Rp. 540.000.000, (Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
74	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah atau batu Panjang 5 x 1200 M	Jalan Aneka RT. 14 dan RT. 08 Dusun Sumber Jaya, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 5 Meter dan Panjang 1200 Meter dengan Nilai Rp. 2,160.000.000 (Stunting)
75	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah atau batu Panjang 4 x 500 M	Jalan Baung RT. 006 Dusun Purwodadi, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1.560.000.000,00 (Stunting)
76	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah atau batu Panjang 4 x 700 M	Jalan Bawal RT. 20 Dusun Purwodadi, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 560 Meter dengan Nilai Rp. 2.184.000.000,00 (Stunting)
77	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian 0,5 x 600 M	Jalan Lais RT. 05 Dusun Purwodadi, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 600 Meter dengan Nilai Rp. 1.080.000.000,00 (Stunting)
78	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian 0,5 x 1000 M	Jalan Arwana RT.003 Dusun Muara Damai, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Wanasari	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 600 Meter dengan Nilai Rp. 1.800.000.000,00 (Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
79	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya semenisasi	Desa Long Nyelong RT. 1 RT 2. RT 3, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Busang	Long Nyelong	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)
80	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian	Jl. Delin Daq RT. 03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Nehes Liah Bing	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
81	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak Drainase Lingkungan Permukiman berupa Tanah	Jalan Puntadewa Rt 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sumber Agung	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
82	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak Drainase Lingkungan Permukiman berupa Tanah	Jalan Arjuna Rt 03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sumber Agung	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
83	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	jalan nanas rt.02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Segoy Makmur	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
84	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah	Jl. Kutai RT. 07 Desa Ngayau, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Ngayau	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)
85	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya saluran drainase di lingkungan permukiman desa sika makmur yang berupa tanah galian	Jl.Flamboyan RT.006, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Sika Makmur	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
86	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah / batu	RT 005 DESA MUARA WAHAU, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Wahau	Muara Wahau	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Stunting)
87	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu	Jalan Bengkal RT.05 Desa muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Muara Bengkal Ilir	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
88	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian	Muara Bengkal Ulu, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Muara Bengkal Ulu	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
89	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian	Jalan Ahmad.S RT.04 Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Bengkal	Muara Bengkal Ilir	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
90	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak Drainase Lingkungan Permukiman berupa tanah galian.	Dusun Long Anye Rt 01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Long Segar	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
91	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (1,7 KM)	Desa Juk Ayaq RT. 004 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Juk Ayaq	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 1700 Meter dengan Nilai Rp. 5,304.000.000 (Kemiskinan)
92	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu (2 KM)	Desa Juk Ayaq RT.003, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Juk Ayaq	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 2000 Meter dengan Nilai Rp. 6,240.000.000 (Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
93	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Sering terjadinya genangan air di area permukiman RT.IV pada saat Musim hujan, sehingga menyebabkan Kotoran atau sampah meluap ke area jalan Permukiman	Jl.Lencau Ncuk RT.IV Desa Long Noran, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Long Noran	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 50 Cm dan Tinggi 60 CM Penampang Basah) Panjang 300 Meter dengan Nilai Rp. 630.000.000, (Kemiskinan)
94	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu diperlukan semenisasi jalan Lingkungan RT.IV	Jl.Lencau Ncuk RT.IV Desa Long Noran, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Long Noran	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)
95	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian	Desa Lung Melah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Lung Melah	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Drainase Beton Ukuran (Lebar 40 Cm dan Tinggi 50 CM Penampang Basah) Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 900.000.000,00 (Kemiskinan)
96	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu P: 1000m L: 4m	Dusun Meranti RT 06, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Marah Haloq	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)
97	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	masih banyak jalan lingkungan pemukiman yang belum diSemenisasi	Jl.Poros 5 RT.08, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Gemar Baru	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
98	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Jalan Lingkungan Pemukiman Yang Belum di Semenisasi	Jalan Salib, RT.05, Desa Gemar Baru, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Gemar Baru	Usulan ini di Estimasi Pekerjaan Semenisasi Ukuran Lebar 4 Meter dan Panjang 500 Meter dengan Nilai Rp. 1,560.000.000 (Kemiskinan)
99	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/baru	RT 001 s/d RT 005, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Tesak	"Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 650M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 1.664.000.000,00"
100	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyaknya Drainase lingkungan berupa tanah galian sehingga drainase mudah longsor dan tertutup kembali.	Dusun Belwen Desa Long Nah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Nah	"Estimasi Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 350,000,000.00"
101	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu sehingga pada saat musim hujan jalan menjadi berlumpur.	Dusun Belwen RT 05 Desa Long Nah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Nah	"Estimasi Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 350,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
102	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Saat ini dalam kondisi masih jalan tanah dan becek saat musim hujan	jl,Rafflesia RT 01,jl,Mawar RT 02,jl,Dahlia RT 04,jl,Seroja RT 05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Poq Baru	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 3600M Lebar : 6M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 30,412,800,000.00"
103	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak Drainase lingkungan berupa tanah galian sehingga galian drainase longsor dan tertutup.	Dusung Baeng Diang Jaya Desa Long Nah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Long Nah	"Estimasi Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 350,000,000.00"
104	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian 1mx200m	RT.05, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Mawai Indah	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang : 200M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 2,007,720,000,000.00"
105	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah 5mx100m	RT.03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Mawai Indah	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 100M Lebar : 5M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 704,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
106	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu P: 1.500M L:5M T :20 Cm	Dusun Payaq Selung RT 1.2.3 Dusun Peluju RT: 4.5.6 dan RT 7, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Rantau Panjang	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 1500M Lebar : 5M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 10,560,000,000.00"
107	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian P:2000 M L : 60	Dusun Payaq Selung RT 1.2.3 Dusun Peluju RT: 4.5.6, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Telen	Rantau Panjang	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang : 2000M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 20,077,200,000,000.00"
108	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Permukiman Berupa Tanah/natu	Desa Kelinjau Ulu, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Muara Ancalong	Kelinjau Ulu	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 350,000,000.00"
109	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	Jalan Poros Desa Susuk Luar, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Susuk Luar	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 3000M Lebar : 6M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 25,344,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
110	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Perlu adanya Pembangunan Drainase Lingkungan di 5 RT untuk pembuangan air, mengingat setiap musim hujan air tergenang (panjang Drainase $\pm$ 1 Km)	RT.1 s/d RT.5, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau Ulu	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang : 1000M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 10,038,600,000,000.00"
111	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Kondisi jalan saat ini masih tanah (P X150 L X 4X T 20)	RT.03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Mugi Rahayu	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 200M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 563,200,000.00"
112	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu Jalan Menuju TPU P=2.000 M x L=6 M T=0,3 M	Desa Batu Timbau RT.01, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 2000M Lebar : 6M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 16,896,000,000.00"
113	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu Jalan Menuju KM 02 P=1.300 M x L=5 M T=0,3 M	Desa Batu Timbau Jl. Base Camp RT.011, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 1300M Lebar : 5M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 4,576,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
114	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya jalan penghubung di wilayah Dusun Telaga Timur. Dengan ukuran 4x100 m	Dusun Telaga Timur, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Telaga	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 100M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 281,600,000.00"
115	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perlunya Semenisasi Jalan Lingkungan Pemukiman/Pendidikan Menuju SDN 006 12000 M x 4 M	RT.001, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Himba Lestari	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 12000M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 33,792,000,000.00"
116	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Kondisi jalan saat ini masih tanah	RT.02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Mugi Rahayu	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 350,000,000.00"
117	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (100 x 5 Meter)	Jl. Kapur Rt.01 Desa Beno Harapan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Beno Harapan	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 100M Lebar : 5M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 352,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
118	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu Dusun Rawa Indah RT 05 p=1500 m L=4 m xT=0,20 m	RT 05 Dusun Rawa Indah, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Telaga	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 1500M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 4,224,000,000.00"
119	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Belum terbangunannya Drainase Jalan di lingkungan RT.11 jika terjadi hujan maka jalanan akan tergenang air, dan menyebabkan jalan menjadi licin dan berlumpur. P = 200 m L=60 cm T= 60 cm	Desa Batu Timbau, Jl. Base camp Rt.011, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Batu Ampar	Batu Timbau	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 200M Lebar : 6M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 1,689,600,000.00"
120	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan Masih Berupa Tanah	Jalan Poros Gang RT.001, RT.004, RT.006, RT.008, dan RT.005 Dusun Sido.Dadi, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Long Mesangat	Tanah Abang	"Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 650M Lebar : 4M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 1,664,000,000.00"
121	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian maka diperlukan semenisasi drainase dengan panjang 8 kilometer kiri dan kanan	Jl. Poros Desa Susuk Tengah, RT. 01-RT.04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Susuk Tengah	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang : 16000M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 160,617,600,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
122	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan pemukiman berupa tanah galian makak diperlukan semenisasi drainase sepanjang 400 meter	Jl. Imam Juhri Tubasar RT. 02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Susuk Tengah	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang :400M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 2,244,000,000,000.00"
123	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	Jl. Gn. Tampomas I RT.07, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Bukit Permata	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 1500M Lebar : 6M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 12,672,000,000.00"
124	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak pemukiman yang belum memiliki jalan lingkungan (masih jalan setapak) P : 5 KM L : 5 M	Jalan Poros Belidan RT.07, 03 dan 04 Desa Marukangan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Marukangan	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Timbunan Pilihan) dengan Panjang : 5000M Lebar : 5M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 2,750,000,000.00"
125	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian (P : 5v KM, L : 60 cm, T : 80 cm Kiri-Kanan)	Jalan Poros Belidan RT.07, 03 dan 04 Desa Marukangan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Marukangan	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan anggaran (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 500,000,000.00"

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
126	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Belum adanya semenisasi jalan menuju sekolah SMP Filial sepanjang jalan 2 KM Lebar 8 Meter	RT.04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Tadoan	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Semenisasi Jalan) dengan Panjang : 2000M Lebar : 8M Tinggi : 0,20M (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 22,528,000,000.00"
127	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Belum Adanya Drainase di Lingkungan Sepanjang 5.000 Meter	RT 01 / RT 04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Tadoan	"Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan (Drainase) dengan Panjang : 5000M Ukuran 60x65 (Penuntasan Kemiskinan) Rp. 50,193,000,000,000.00"
128	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	Jalan Mawar, Jl. Mawar 2, Jalan Pisang, Jalan Anggrek, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Bumi Jaya	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 150m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 422.400.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
129	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah dan Batu	Jl. Danau Singkarak RT.08, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Bumi Rapak	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.520.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
130	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan berupa tanah / batu panjang 500 Meter dan Lebar 4 Meter	Jalan Cendana RT. 010, Jalan Pendidikan RT. 001, Jalan Jelutung RT. 007, Jalan Kruwing RT. 011, Jalan Beringin RT. 009, Jalan Bangkirai RT. 002, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Bumi Etam	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.408.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
131	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian dengan ukuran Panjang 1.000 meter dan Lebar 1 Meter	Jalan Palma RT. 006, Jalan RT. 009, Jalan Kenari RT. 012, Jalan Pendidikan RT. 001, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Bumi Etam	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 1000m x Lebar 60cm x Tinggi 65cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.574.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
132	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Permukiman Berupa Tanah/Batu sepanjang 100 M	Simpang 3 Jl. Jembatan Sei Nibung RT.001, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Kadungan Jaya	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
133	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	masih banyak drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	jalan desa RT. 001 sampai RT. 013 Desa Pengadan Baru, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Pengadan Baru	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 500m x Lebar 60cm x Tinggi 65cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.287.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
134	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Permukiman Berupa Tanah/Batu sepanjang 100 M	Jalan Jeruk RT.004 , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Kadungan Jaya	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 100m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 352.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
135	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah atau batu sepanjang 6 Km	jalan Desa RT. 001 Sampai RT. 13 Desa Pengadan Baru, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Kaubun	Pengadan Baru	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.760.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
136	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah/Batu, Sepanjang Jalan 16.350 Meter, Lebar 6 Meter dan Tebal 35cm.	Jalan Mulawarman. A, Desa Kerayaan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Kerayaan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 16350m x Lebar 6m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 69.062.400.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
137	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (P:450 M L: 6)	Jl. Ibrahim Ahmad RT. 023, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Benua Baru	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 450m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.584.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
138	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (P:1000 M L: 5)	Jl. Kadrie Oening RT. 023, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Benua Baru	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 3.520.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
139	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa batu / tanah galian sepanjang 819,2 Meter lebar 8 meter	RT 02 Jalan Kampung Kajang, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Pelawan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 820m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.309.120.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
140	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak jalan kondisi rusak dan lapisan tanah sehingga perlu semenisasi jalan sepanjang 5 KM Lebar 8 M	Jl. Godang lama, jl. Hasbullah, Jl. Sami AM, Jl. Masjid Al Falah, Jl. Madong, Jl. H. Busriyansyah, Jl. M. Ali , Jalan Dermaga Tirusan/Ilyas dan jl. Sentape , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Peridan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 5000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 17.600.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
141	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah / Batu	Jl. Singa Mantri RT.02, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Mukti Lestari	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1500m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 5.280.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
142	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian, Panjang Jalan 16.350 Meter Lebar 120 Cm dan Ketebalan 80Cm.	Jalan Mulawarman. B, Desa Kerayaan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Kerayaan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 16350m x Lebar 60cm x Tinggi 65cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 42.084.900.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
143	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan penghubung antar Desa / Kecamatan rusak sepanjang 4 Km Lebar 8 M	RT 1, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Pelawan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 2081m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 7.325.120.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
144	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu (P= 3000 m L=8 m tebal = 0,4 m	Jalan Poros Desa , Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Maloy	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 3000m x Lebar 6m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 12.672.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
145	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu 3 meter x 1.000 meter	Sabalokan, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Pulau Miang	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1000m x Lebar 3m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 2.112.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
146	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu sehingga perlu disemenisasi dengan volume : Panjang 300 Meter dan Lebar 4,5 Meter dengan kontruksi beton.	Jl. Masjid Al-Istiqomah RT. 03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Tepian Terap	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 300m x Lebar 4,5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 950.400.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
147	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian sepanjang 1 KM	RT 004, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Mandu Pantai Sejahtera	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 1000m x Lebar 50cm x Tinggi 60cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.760.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
148	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Permukaan Berupa Tanah / Batu	Jalan Poros Desa Tanjung Manis Rt.01 s/d rt.04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Tanjung Manis	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 4000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 14.080.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
149	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu sepanjang 3 KM, Lebar 5 meter	jalan poros desa kolek, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Kolek	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 3000m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 10.560.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
150	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	perlunya pembangunan drainase jalan lingkungan sepanjang 6 km	jalan poros desa kolek, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Kolek	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 10000m x Lebar 60cm x Tinggi 65cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 25.740.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
151	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah / Batu dengan ukuran speseifikasi Panjang :7500 meter dan Lebar : 5 meter	Jalan Poros Desa Saka RT01, Jalan Poros Desa Saka RT02, Jalan Poros Tungkap Desa Saka RT04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Saka	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 7500m x Lebar 5m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 26.400.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
152	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Drainase Lingkungan Pemukiman Berupa Tanah Galian(Panjang : 4000 meter)	Jalan Poros Desa Saka RT01,RT02, Jalan Poros Tungkap RT04, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	Saka	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 8000m x Lebar 60cm x Tinggi 65cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 20.592.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
153	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu P=1500 Meter Lebar =6 Meter	Jalan S.Parman RT 01 dan RT 02 Desa Karangan Hilir, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Karangan Hilir	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 1500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 4.224.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
154	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan pemukiman berupa tanah/batu Panjang 2000 Lebar 6 Meter	Jalan segara RT 06 Desa Karang Hilir, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Karangan Hilir	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 2000m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 5.632.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
155	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Keterbatasan prasarana sarana dan utilitas umum (psu) masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah / batu	Jl abdul muis RT 001 dusun II manubar, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Manubar	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.408.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
156	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Keterbatasan prasarana sarana dan utilitas umum (psu) masih banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah / batu	Jl Rusman Hasan Rt 001 manubar pantai sampai RT 006 perpat tunggal, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Sandaran	Manubar	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 500m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.408.000.000, Kategori (Pengentasan Kemiskinan)
157	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak lapisan permukaan jalan lingkungan permukiman berupa tanah/batu	Jalan Ulin,Jalan Matahari,dan Jalan Batu Bara, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Pengadan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 2000m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 5.632.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
158	Semenisasi Drainase Lingkungan Permukiman	Masih Banyaknya drainase lingkungan permukiman berupa tanah galian	Jalan Ulin dan Batubara, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Pengadan	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Drainase (Panjang 1000m x Lebar 50cm x Tinggi 60cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 1.760.000.000, Kategori (Penurunan Stunting)
159	Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman	Masih Banyak Lapisan Permukaan Jalan Lingkungan Permukiman Berupa Tanah/Batu	RT. 03, Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Karangan	Batu Lepoq	Usulan Diterima Dengan Pekerjaan Semenisasi (Panjang 200m x Lebar 4m x Tinggi 20cm) Dengan Estimasi Biaya Rp. 563.200.000, Kategori (Penuntasan Kemiskinan)

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah diverifikasi, dapat disimpulkan bahwa usulan masyarakat pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didominasi oleh kebutuhan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penataan lingkungan permukiman. Seluruh usulan tersebut telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan tahun perencanaan, sehingga menjadi bagian yang diintegrasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai wujud perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Seluruh rencana yang tertuang dalam dokumen ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur, serta Asta Cita pembangunan nasional.

Secara garis besar, Renja Tahun 2026 diarahkan pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman. Selain itu, penguatan pelayanan administrasi dan tata kelola perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Diharapkan melalui pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini, seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan permukiman yang layak, sehat, tertata, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan

wajib dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat pelaksana kegiatan wajib memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang optimal, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam penilaian kinerja perangkat daerah, sekaligus sebagai bahan perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renja diharapkan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

5.3. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, diperlukan penguatan kualitas perencanaan melalui pemutakhiran data yang akurat, khususnya terkait RTLH, kawasan kumuh, dan kebutuhan PSU. Selain itu, sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih terpadu dan tepat sasaran.

Ke depan, integrasi antara usulan Musrenbang, prioritas pembangunan daerah, dan kemampuan keuangan daerah harus terus diperkuat agar program yang direncanakan bersifat realistis dan dapat dilaksanakan secara optimal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan juga perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja dan perencanaan tahun berikutnya.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi pemutakhiran data secara berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan program prioritas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Extra

LAMPIRAN

Cascading Renstra Tahun 2025-2030

MISI 3 : Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas.

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR dan Korban Bencana yang Menerima Bantuan}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga MBR dan Korban Bencana yang Terdasa dan Layak}} \right) \times 100\%$$

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF																		
					2023	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR						
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19					
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			-	-	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000					
		1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan			50 Orang	200.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000					
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu/kota yang terbangun atau terehabilitasi			164	24.500.000.000	175	129.180.000.000	215	143.180.000.000	225	198.390.000.000	235	241.690.000.000	240	264.405.000.000	240	264.405.000.000					
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			100 Unit Rumah	6.000.000.000	55 Unit	31.500.000.000	65 Unit	41.820.000.000	65 Unit	47.580.000.000	65 Unit	80.760.000.000	65 Unit	80.820.000.000	65 Unit	80.820.000.000					
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			34 Unit Rumah	4.000.000.000	100 Unit	46.000.000.000	100 Unit	47.495.000.000	100 Unit	76.705.000.000	100 Unit	80.155.000.000	100 Unit	89.930.000.000	100 Unit	89.930.000.000					
		1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			8 Unit Rumah	1.000.000.000	20 Unit	1.000.000.000	100 Unit	1.000.000.000	100 Unit	1.000.000.000	100 Unit	1.000.000.000	100 Unit	1.000.000.000	100 Unit	1.000.000.000					
		1.04.02.2.03.0008	Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Facilitasi Penyediaan Rumah			-	-	50 Rumah Tangga	1.000.000.000	100 Rumah Tangga	1.000.000.000	100 Rumah Tangga	1.000.000.000	100 Rumah Tangga	1.000.000.000	100 Rumah Tangga	1.000.000.000	100 Rumah Tangga	1.000.000.000					
		1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			30 Unit Rumah	13.500.000.000	200 Unit Rumah	49.680.000.000	200 Unit Rumah	51.865.000.000	200 Unit Rumah	72.105.000.000	200 Unit Rumah	78.775.000.000	200 Unit Rumah	91.655.000.000	200 Unit Rumah	91.655.000.000					
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000					
		1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-	-	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000					
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				-	1 Laporan	106.268.956	1 Laporan	142.638.483	1 Laporan	117.771.492	1 Laporan	158.374.465	1 Laporan	121.901.766	1 Laporan	121.901.766					
		1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			-	-	1 Laporan	106.268.956	1 Laporan	142.638.483	1 Laporan	117.771.492	1 Laporan	158.374.465	1 Laporan	121.901.766	1 Laporan	121.901.766					
									-	125.675.272.414		-	165.272.698.908		-	210.031.026.564		-	222.631.367.569		-	222.631.367.569			
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten		37,84%	38,22%	537.326.666.856	38,73%	125.675.272.414	39,37%	165.272.698.908	40,14%	185.032.444.223	41,03%	210.031.026.564	42,05%	222.631.367.569	42,05%	222.631.367.569					
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			-	-	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000					
		1.04.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum			-	-	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000					
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR	
					2023	2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
1	2	3	4	5																
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000
		1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani			3 Ha	536.326.666.856	4 Ha	123.175.272.414	5 Ha	162.772.698.908	6 Ha	182.532.444.223	7 Ha	207.531.026.564	8 Ha	220.131.367.569	8 Ha	220.131.367.569
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			111 Unit Rumah	21.409.900.000	1 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000
		1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			1 Dokumen	481.916.766.856	1 Dokumen	93.175.272.414	18 Dokumen	135.072.698.908	18 Dokumen	153.832.444.223	18 Dokumen	177.831.026.564	18 Dokumen	189.431.367.569	18 Dokumen	189.431.367.569
		1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
		1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
		1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan			-	-	1 Ha	1.000.000.000	2 Ha	2.000.000.000	3 Ha	3.000.000.000	4 Ha	4.000.000.000	5 Ha	5.000.000.000	5 Ha	5.000.000.000
		1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali			2 Ha	500.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000
		1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-	-	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000	100 Unit	11.500.000.000
		1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			1 Ha	31.000.000.000	1 Ha	2.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000
		1.04.03.2.03.0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			-	-	1 Ha	2.000.000.000	1 Ha	500.000.000	1 Ha	500.000.000	1 Ha	500.000.000	1 Ha	500.000.000	1 Ha	500.000.000
									-	120.039.609.974	-	101.549.598.449	-	127.917.837.715	-	160.286.836.062	-	118.831.264.983	-	118.831.264.983
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang ditangani	0,00%	0%	0%	500.000.000	16,25%	120.039.609.974	32,51%	101.549.598.449	55,27%	127.917.837.715	81,27%	160.286.836.062	100%	118.831.264.983	100%	118.831.264.983
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni yang difasilitasi melalui pendekatan pencegahan			0%	500.000.000	125 Unit	120.039.609.974	150 Unit	101.549.598.449	175 Unit	127.917.837.715	200 Unit	160.286.836.062	144 Unit	118.831.264.983	144 Unit	118.831.264.983
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			-	-	25 Unit	2.875.000.000	50 Unit	5.750.000.000	75 Unit	8.625.000.000	100 Unit	11.500.000.000	72 Unit	8.280.000.000	72 Unit	8.280.000.000
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh			-	-	100 Unit	117.064.609.974	100 Unit	95.599.598.449	100 Unit	119.092.837.715	100 Unit	148.586.836.062	72 Unit	110.351.264.983	72 Unit	110.351.264.983

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR	
					2023	2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19
1	2	3	4	5																
		1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
		1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			20 Orang	200.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000
									-	63.502.104.868	-	88.455.810.683	-	108.250.273.491	-	139.560.090.020	-	164.491.965.847	-	164.491.965.847
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,05%	26,32%	31%	548.741.860.000	32%	63.502.104.868	40%	88.455.810.683	43%	108.250.273.491	48%	139.560.090.020	52%	164.491.965.847	52%	164.491.965.847
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			18 Lokasi	548.741.860.000	18 Lokasi	63.502.104.868	18 Lokasi	88.455.810.683	18 Lokasi	108.250.273.491	18 Lokasi	139.560.090.020	18 Lokasi	164.491.965.847	18 Lokasi	164.491.965.847
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1 Dokumen	1.009.900.000	4 Dokumen	4.900.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000	5 Dokumen	5.000.000.000
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			18 Lokasi	547.731.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			-	-	18 Lokasi	58.402.104.868	18 Lokasi	83.255.810.683	18 Lokasi	103.050.273.491	18 Lokasi	134.360.090.020	18 Lokasi	159.291.965.847	18 Lokasi	159.291.965.847
									-	1.024.665.898	-	581.946.123	-	629.362.055	-	690.891.535	-	709.017.094	-	709.017.094
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	-	-	-	100.000.000	20%	1.024.665.898	40%	581.946.123	60%	629.362.055	80%	690.891.535	100%	709.017.094	100%	709.017.094
		1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	1.024.665.898	1 Laporan	581.946.123	1 Laporan	629.362.055	1 Laporan	690.891.535	1 Laporan	709.017.094	1 Laporan	709.017.094
		1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	1.024.665.898	1 Laporan	581.946.123	1 Laporan	629.362.055	1 Laporan	690.891.535	1 Laporan	709.017.094	1 Laporan	709.017.094
									-	370.611.498.593	-	223.113.192.894	-	255.769.581.433	-	297.621.344.402	-	323.755.215.928	-	323.755.215.928
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	62	65,35	65,5		66		66,5		67		67,5		68		68	
				Nilai IPASN	75	75	75		76	370.611.498.593	76	223.113.192.894	77	255.769.581.433	78	297.621.344.402	79	323.755.215.928	79	323.755.215.928
		1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4 Unit	0	4 Unit	346.132.944.937	4 Unit	198.076.680.562	4 Unit	229.585.268.396	4 Unit	269.616.947.391	4 Unit	292.457.333.630	4 Unit	292.457.333.630
		1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	3 Unit		3 Unit	3.000.000.000	3 Unit	3.500.000.000	3 Unit	4.000.000.000	3 Unit	4.500.000.000	3 Unit	5.000.000.000	3 Unit	5.000.000.000

[illegible]